IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA KETUAN JAYA KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

Septiya Anggraini¹
Universitas Musi Rawas
Seftyallg@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study aims to determine the implementation of the BUMDes program to improve the economy of the village community in Ketuan Jaya Village, Muara Beliti District, Musi Rawas Regency regarding the services and roles of the village government as well as the role of the people of Ketuan Jaya Village, Muara Beliti District, Musi Rawas Regency in the savings and loan program. This study uses a descriptive qualitative method with a normative approach that explains, describes, and describes the data collection techniques through observation, interviews and documentation as well as data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation and data analysis. conclusion and verification. The results show that there is a plan for Standard Operating Procedures but it is still not going well. The plan implements how far the process of saving and borrowing activities at the existing BUMDes is appropriate and running properly. With Standard Operating Procedures in the savings and loan program. And participation in the BUMDES program participation and active village government support for the savings and loan program itself also works with existing ones and not only the role of the community also helps to take advantage of the savings and loan program.

Keywords: *Implementation; BUMDes Savings and Loans*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas mengenai pelayanan dan peran pemerintah desa serta peran masyarakat desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terhadap program simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya rencana untuk Standar Operasional Prosedur namun masih belum berjalan dengan baik, Rencana mengimplementasikan seberapa jauh proses kegiatan simpan pinjam di BUMDes yang ada sudah sesuai dan berjalan dengan semestinya. Dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di program simpan pinjam. Dan Keikutsertaan dalam partisipasi program BUMDES dan dukungan pemerintah desa secara aktif untuk program simpan pinjam sendiri juga berjalan dengan yang ada dan tidak hanya peran masyarakat juga ikut membantu memanfaatkan program simpan pinjam.

Kata Kunci: *Impementasi; Simpan Pinjam*

PENDAHULUAN

Era Otonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahnya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu Undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi sehingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah dibandingkan kelurahan, sehingga tidak dikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lain.

Karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu pemerintah pusat ingin mendorong mensent dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri. Salah satunya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan memiliki BUMDes yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa dan undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa ikut berkecimpungan dan

turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak tumbuhnya ekonomi masyarakat desa. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa PDTT Bapak Bonivasius Prasetya Ictianto, Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) di Indonesia ini mencapai 39.149 ribu dari 74.957 desa. Sebagai besarnya Badan Usaha Milik Desa berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari tahun 2015 sampai 2018 lanjutnya, telah disalurkan dana sebesar Rp187 triliun. Menurut Bapak Bonivasius Prasetya ada sekian persen Badan Usaha Milik Desa yang aktif dan ada juga tidak aktif, jumlah BUMDes yang sudah tidak aktif sekitar 50% penyebabnya utama yakni kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaannya BUMDes masih sangat kurang.

Berdasarkan pada uraian di atas BUMDes yang sudah berdiri di wilayah Indonesia sudah banyak, sehingga dapat dianggap bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat mensejahterakan masyarakat Desa serta bersinergi terhadap Pemerintah Desa untuk memajukan Desa tersebut. Tetapi kenyataannya Badan Usaha Milik Desa ini terkadang tidak melakukan program sehingga mengevaluasi suatu program terkadang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Pemerintah Desa juga harus menunjang Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam berjalannya program program Badan Usaha Milik Desa, sedangkan masyarakatnya bisa ikut serta dalam pengelolaan maupun kepentingan yang bertujuan membangun masyarakat desa.

TIJAUAN PUSTAKA

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implentasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Definisi BUMDes menurut Maryuni (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat prekonomian desa dan membangun keeratan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

BUMDes simpan pinjam adalah jenis usahayang bergerak dibidang perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui usaha simpan pinjam yang dikelola secara individu di bawah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa secara umum pendirian bumdes simpan pinjam cukup dengan membentuk unit usaha dalam bentuk simpan pinjam dibawah naungan dang peraturan desa (perdes).

Ketika kita membahas terkait dengan simpan pinjam tentunya kita sudah bisa membayangkan bahwa ada transaksi dan interaksi yang terjadi antara dua atau lebih dari dua orang yang membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti yang juga disampaikan oleh beberapa pakar yang dikutip dalam sebuah artikel yang di unggah pada media online lisafitri 2008. blogspot.comdimana menurut Melayu SP Hasibuan (1996) pengertian simpan

pinjam: simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat..

Menurut Anderson dalam Public Polic Makin (19840), kebijakan public adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena teorinya belum jelas sehingga tidak memungkinkan menggunakan penelitian kuantitatif. Menemukan pola, hipotesis, dan teori.

Pentingnya suatu metode penelitian karena suatu penelitian akan berhasil apabila dilaksanakan berdasarkan metodologi yang benar dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 6 (enam) informan yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda, namun keenam informan atau narasumber ini semuanya merupakan actor dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ketuan Jaya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat maka semua narasumber yang terlibat dalam wawancara ini merupakan individu yang terlibat dalam program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ketuan Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian

ini, maka peneliti dapat melakukan analisis dengan tema proses dan hasil dari penerapan program simpan pinjam BUMDes di Desa Ketuan Jaya.

Dari Hasil pengamatan peneliti melalui teknik Observasi dan Dokumentasi di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Mura Beliti Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, gedung yang digunakan untuk kegiatan/aktivitas kantor merupakan sebuah rumah yang dimiliki oleh Bendahara BUMDes Desa Ketuan Jaya. Kondisi kantor tidak memadai dan tidak layak untuk digunakan sebagai kantor, hal tersebut dikarenakan lokasi kantor yang selain berada di permukiman penduduk, kantor juga digunakan untuk tempat tinggal dan aktifitas rumah pribadi.

Dalam wawancara tersebut kedua narasumber menjelaskan hal serupa terkait dengan faktor utama yang mendasari terbentuknya program Simpan Pinjam BUMDes desa ketuan jaya, dimana dalam penjelasan keduanya mengatakan bahwa faktor utama berdirinya program, karena dilandasi rasa peduli pemerintah yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat di desa ketuan jaya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa program simpan pinjam BUMDes di desa ketuan jaya belum sepenuhnya berhasil, hal tersebut dinilai dari banyaknya faktor yang seharusnya dipenuhi untuk mencapai keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, baik dari faktor internal (BUMDes), maupun dari faktor eksternal (Masyarakat), dan penerapan/implementasi belum sesuai/belum memenuhi unsur teori Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes desa ketuan jaya seperti yang dibahas di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Secara umum untuk memenuhi unsure-unsur penting dalam melakukan suatu implementasi kebijakan/program, sebaiknya BUMDes desa ketuan jaya dapat memfokuskan pada permasalahan internal terlebih dahulu, dimana beberapa hal terpenting yang masih perlu diperbaiki adalah:

- a. Penambahan karyawan (Jumlah SDM)
- b. Penetapan personil yang akan bertanggung jawab terhadap program kerja.
- c. Pengawasan dan evaluasi kinerja karyawan.
- d. Memenuhi kebutuhan dasar organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S.,K.,D. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. (diakses 14 November 2019)
- Asep Kartiwa, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Juliman (2017). *Optimalisasi Tata Kelola Bumdes Desa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Vol. 4. No 1*.
- Mardikanto, T. &, Poerwoko, S. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Maria, R.,R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan*

Masyarakat Perdesaan di Gunung Kidul Yogyakarta Edisi 2016. Vol. 28 No. 2. <http://ojs.vajiy.ac.id>

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 4 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendiri, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Desa Mandiri

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Desa Ketuan jaya No.13 Tahun 2017 Tentang peraturan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Samadi, A. & Rahman, A. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDES Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu*

Kabupaten Rokan Hulu). <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378> (diakses 11 November 2019)

Sugiyono,2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Albeta:Bandung

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perekonomian BUMDES.

Wahab,solichin Abdul,2018. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negar*. Jakarta: PT.Buni Aksara